

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu instansi menerapkan sistem pengendalian intern sebagai penunjang dalam menjalankan usahanya. Sistem tersebut disesuaikan dengan keadaan dan kondisi masing-masing instansi/organisasi pemerintah karena jenis dan bentuk instansi yang berbeda-beda. Menurut James A. Hall ,**“Sistem adalah kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama.”**<sup>1</sup>

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah:

**Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan**<sup>2</sup>.

Sistem ditandai dengan rangkaian langkah-langkah yang sejalan dan berulang-ulang yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Pengendalian adalah usaha untuk mencapai atau mempertahankan keadaan atau kondisi yang diinginkan sebagai suatu sistem atau prosedur yang mana rencana dan pelaksanaan tindakan dibandingkan berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan reaksi yang memadai terhadap hasil-hasil pelaksanaan tersebut. Pengendalian

---

<sup>1</sup>James A. Hall, **Sistem Informasi Akuntansi**, Buku Satu: Edisi Empat, Salemba Empat, Jakarta, hal. 6

<sup>2</sup>Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang, **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**.

intern mencapai mencakup rencana organisasi serta metode-metode terkait dan pengukuran yang diadopsi oleh instansi/organisasi pemerintah untuk melindungi aset dari penyalahgunaan pegawai.

Sistem pengendalian intern yaitu suatu sistem yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan perundang-undangan yang disusun oleh pemerintah. Dalam perkembangannya, sebuah organisasi pemerintah dituntut untuk dapat mengelola kegiatannya sekaligus dapat mengatasi masalah-masalah yang selalu timbul khususnya di bidang pengendalian hartanya. Salah satu hal yang paling penting dan paling sulit diawasi adalah kas.

Kas merupakan aktiva yang dimiliki dan digunakan pada semua lembaga negara. Kas merupakan alat pembayaran yang diterima umum yang tersedia untuk pembayaran yang tidak dibatasi penggunaannya, baik yang berada ditangan (*cash on hand*) maupun yang berada di bank. Kas meliputi uang tunai (kertas dan logam) yang disimpan di rekening. Kas dilihat dari sifatnya merupakan aset yang paling lancar dan hampir setiap transaksi dengan pihak luar selalu mempengaruhi kas. Kas mempunyai ciri-ciri seperti; bentuknya kecil sehingga mudah dibawa kemana-mana, mudah dan dapat dengan cepat ditransfer, tahan lama, sulit diidentifikasi pemiliknya. Dengan memperhatikan ciri-ciri kas tersebut menjadikan kas sering menjadi sasaran penyimpangan atau penyelewengan. Bila dalam instansi/organisasi pemerintah terjadi penyimpangan atau penyelewengan

maka instansi harus mengelola kasnya sedemikian rupa. Karena begitu mudahnya uang dialihkan atau dipindah tangankan, maka kas merupakan aktiva yang cenderung diselewengkan atau disalahgunakan oleh pegawai. Karena itu instansi/organisasi pemerintah harus merancang dan menggunakan pengendalian intern terhadap transaksi kas.

Sistem pengendalian intern adalah suatu sistem yang merupakan kebijakan, praktik, prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan utama, yaitu untuk menjaga aktiva instansi/organisasi pemerintah, memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi, mendorong efisiensi dalam operasional suatu instansi/organisasi pemerintah, dan mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak instansi. Suatu pengendalian intern yang baik akan menghasilkan informasi yang benar dan dapat diterima oleh pegawai dan pimpinan instansi serta mampu memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan aktiva yang perlu diawasi. Sistem pengendalian intern pada setiap instansi pemerintah tentunya berbeda-beda sistemnya tergantung pada kebijakan dari pemerintah pusat tersebut. Untuk mewujudkan pengendalian intern kas yang berjalan dengan baik maka unsur-unsur pengendalian intern, prinsip-prinsip pengendalian intern dan prosedur pengendalian intern atas kas harus terpenuhi.

Komponen-komponen pengendalian intern terdiri dari: Lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Lingkungan pengendalian menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orang

yang ada di dalam organisasi tersebut. Penaksiran resiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membuat menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

Sementara itu adapun tujuan dari pengendalian kas adalah adanya pemisahan tugas, menjaga kekayaan organisasi dengan cara menghindari terjadinya penyimpangan dan penyelewengan serta mencek keandalan data akuntansi, serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Organisasi pemerintah tidak dijalankan dengan cara-cara bisnis yaitu adanya kebijakan pengelolaan-pengelolaan atau pemimpin organisasi publik (pemerintahan) pada dasarnya dimotivasi oleh keinginan untuk dipilih kembali, dan memperoleh sebagian besar uangnya dari pembayar pajak bukan dari pelanggan, dimana organisasi ini bersifat demokratis dan terbuka, sehingga biasanya lebih lambat dalam pengambilan keputusan dan dilihat dari tujuannya adalah pemberian pelayanan publik, dan penyediaan pelayanan publik, tetapi meskipun tujuan utama sektor publik adalah pemberian pelayanan publik, tidak berarti organisasi ini tidak memiliki tujuan yang bersifat finansial, hanya saja

berbeda baik secara filosofis, konseptual dan operasionalnya dengan tujuan profitabilitas sektor swasta. Sumber pendanaan organisasi ini atau dalam istilah manajemen keuangan disebut struktur modal atau sumber pembiayaan berasal dari pajak dan retribusi, *charging for service*, laba perusahaan milik negara pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah, dan pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ditetapkan. Pada sektor publik manajemen bertanggungjawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat (*public funds*) yang bersifat vertikal dan horisontal. Pertanggungjawaban vertikal adalah (*vertikal accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada pemerintah pusat, sedangkan pertanggungjawaban horisontal (*horisontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dalam hal karakteristik anggaran, pada sektor publik rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan, karena anggaran bukan sebagai rahasia negara, dimana sistem akuntansi yang digunakan lebih banyak menggunakan sistem akuntansi berbasis kas (*cash basis accounting*).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010  
Tentang Standar Akuntansi Pemerintah :

**Penggunaan laporan keuangan berasal dari berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan beberapa kelompok pengguna laporan keuangan pemerintahan, namun tidak terbatas pada: (a) masyarakat; (b) wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; (c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman daerah; (d) pemerintah.<sup>3</sup>**

Badan pendapatan daerah adalah salah satu instansi yang bergerak dalam pengelolaan terhadap fungsi-fungsi keuangan. Tentu dalam operasinya Pendapatan Daerah tidak luput dari kurangnya sistem pengendalian intern terhadap kas. Anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Perbedaan antara angka realisasi dengan anggaran yang telah dibuat merupakan suatu hal yang wajar terjadi. Walaupun demikian pemerintah tetap harus menganalisis penyebab terjadi varians anggaran supaya lebih tepat dalam memproyeksi anggaran ditahun-tahun berikutnya. Perbedaan realisasi anggaran dapat membawa dampak positif maupun negatif.

Pentingnya penerapan sistem pengendalian intern dalam hal ini pengeluaran kas di latar belakangin oleh Badan Pemeriksaan keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat. Sistem pengendalian intern yang baik tentunya akan memberikan jaminan terhadap kualitas dan kinerja secara menyeluruh, termasuk keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas

---

<sup>3</sup> **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah**, Jakarta: Selemba Empat, 2012, Lampiran I.01 kerangka Konseptual-hal.5

keandalan laporan keuangan. Terkait dengan uraian tersebut, penerapan sistem pengendalian intern pengeluaran kas pada akhirnya menjadi salah satu bagi setiap instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah dalam rangka mewujudkan laporan keuangan yang handal dan akurat. Oleh karena itu pengendalian intern terhadap kas usaha sangat penting. Kecurangan dalam suatu siklus kerja juga sering terjadi sehingga dapat merugikan instansi/organisasi pemerintah. Kecurangan yang mungkin terjadi pada bagian kas adalah tidak dicatatnya kas dari Bendaharawan Umum Daerah (BUD), melakukan pembukuan palsu atas mutasi kas, tidak dicatat tepat waktu.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka instansi/organisasi pemerintah harus mempunyai pengendalian intern yang baik atas kas nya. Badan Pendapatan Daerah Pemerintahan Kabupaten Samosir, Berdasarkan kegiatan yang dilakukan badan pendapatan daerah ini mengharuskan untuk mempunyai suatu sistem pengendalian intern atas pengeluaran kas yang baik, yang dapat dipercaya dan diandalkan oleh pihak instansi dalam pengambilan suatu keputusan. Pengeluaran kas dalam Badan Pendapatan Daerah ini berasal dari belanja daerah yaitu belanja operasional berupa, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Dan belanja modal berupa, belanja modal modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya.

Pengawasan internal atau sekarang ini sering dikatakan sebagai pengendalian internal merupakan prosedur-prosedur secara terperinci yang dipakai oleh pimpinan pengelolaan untuk mengawasi atau mengendalikan badan

usaha secara kolektif. Pengendalian yang baik dan efektif, memungkinkan pimpinan organisasi pemerintah untuk mengamankan kekayaan milik negara serta dapat mengatur dan merencanakan pekerjaan untuk saat ini dan untuk masa yang akan datang. Seperti halnya badan pendapatan daerah kabupaten samosir, badan pendapatan daerah kabupaten samosir merupakan salah satu badan pemerintah yang dibentuk untuk mengelola pendapatan daerah. Meskipun badan ini dikhususkan untuk mengelola pendapatan daerah, badan pendapatan daerah juga tentunya memiliki transaksi pengeluaran seperti pengadaan barang dan perlengkapan kantor. Oleh karena itu sangat diperlukan suatu pengendalian intern yang tujuannya adalah untuk mengamankan aset milik negara dan berbagai bentuk penyelewengan yang dapat merugikan negara, meningkatkan efisiensi dan mendorong agar pegawai mematuhi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan sehingga penyelewengan dan kecurangan dapat dihindari atau ditekan sekecil mungkin.

Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern yang terintegrasi telah memberikan dampak baik terhadap proses kegiatan akuntansi pengeluaran kas dalam Badan Pendapatan Daerah dan untuk mendalami secara detail mengenai penerapan sistem pengendalian intern terhadap kas maka penulis merasa tertarik untuk membuat tulisan skripsi yang berjudul : **“SISTEM PENGENDALIAN INTERN KAS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAHAN KABUPATEN SAMOSIR”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Setiap instansi/organisasi pemerintah dalam menjalankan kegiatannya selalu menghadapi permasalahan yang berbeda-beda sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan usaha operasionalnya merupakan faktor penghambat atau menghalangi terealisasinya tujuan yang hendak dicapai.

Menurut Moh. Nazir :

**“Masalah timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian ataupun kebingungan kita terhadap suatu fenomena, adanya kemenduaan arti (*ambiguity*), adanya celah (*gap*) baik antarkegiatan atau antarfenomena, baik yang telah ada ataupun yang akan ada.”<sup>4</sup>**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulisan merumuskan masalah yang menjadi dasar penyusunan skripsi yang di lakukan pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintahan Kabupaten Samosir adalah **“Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern atas pengeluaran kas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir?”**

## 1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, yang menjadi batasan masalah adalah bagaimana Penerapan Sistem Pengendalian Intern khususnya terhadap Pengeluaran Kas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.

---

<sup>4</sup>Moh. Nazir, **Metode Penelitian**. Cetakan Keenam: Ghalia Indonesia, bogor , 2005, hal. 111

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Sistem pengendalian intern atas Pengeluaran Kas pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintahan Kabupaten Samosir.

#### **1.5 Manfaat penelitian**

Penulis melaksanakan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah dengan harapan agar penelitian dapat bermanfaat bagi:

##### **1. Instansi**

Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern kas yang di lakukan Badan Pendapatan Daerah Pemerintahan Kabupaten Samosir. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Badan Pendapatan Daerah Pemerintahan Kabupaten Samosir. Sebagai pertimbangan atau bahan pendukung keputusan bahwa penilaian usaha sangat penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.

##### **2. Penelitian Selanjutnya**

Sebagai bahan informasi, referensi, dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang bertanggungjawab dan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam bidang pengendalian intern kas dan dapat memberikan informasi dan gambaran jelas bagi peneliti lainnya yang ada hubungan dengan masalah ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Sistem Pengendalian Intern

Sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pengendalian intern dimiliki oleh sebuah entitas atau organisasi untuk mengarahkan operasi terdiri dari pemimpin instansi/organisasi pemerintah dan sejumlah pegawai serta bagian-bagian yang ditentukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja.

Mulyadi, mengemukakan bahwa:

**“Pengendalian intern sebagai suatu proses-yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain –yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan efektivitas dan efisiensi operasi.”<sup>5</sup>**

Sementara Mei Hotma Mariati Munthe mengemukakan bahwa:

**“Sistem pengendalian merupakan proses untuk mencapai tujuan tertentu atau merupakan rangkaian tindakan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan .”<sup>6</sup>**

Pengendalian intern terdiri dari beberapa komponen yaitu:

- a. Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya.

---

<sup>5</sup> Mulyadi, **Auditing**, Buku Satu, Edisi Enam: Salemba Empat, Jakarta 2014, hal. 180

<sup>6</sup> Mei Hotma Mariati Munthe, **Sistem Informasi Akuntansi**, Buku Satu, Edisi Pertama: Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2016, hal. 130

- b. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.
- c. Penaksiran resiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya tujuan, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.
- d. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.
- e. Informasi dan Komunikasi adalah mengidentifikasi, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggungjawab mereka.
- f. Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern.

Pengendalian intern yang baik diharapkan dapat tercapai apabila keenam unsur diatas harus terpenuhi yang merupakan perpaduan unsur yang membentuk sistem. Apabila terdapat kekurangan pada salah satu unsur maka dapat di anggap pengendalian intern kurang baik dan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Pada umumnya instansi harus mengetahui apa tujuan dari pengendalian intern sebelum merancang pengendalian dalam suatu instansi.

Kas diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada dalam instansi beserta pos-pos lain yang dalam jangka waktu dekat dapat diungkapkan sebagai alat pembayaran kebutuhan financial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Sementara

Oloan Simanjatak dan Magdalena Siringo-ringo mengemukakan defenisi kas sebagai berikut: “Kas terdiri atas saldo kas (*cash on hand*) dan giro (*cash in bank*). *Cash Equivalent* merupakan investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka waktu pendek, dan dapat cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa mengalami perubahan nilai yang signifikan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan sistem pengendalian intern kas adalah suatu susunan yang didalamnya meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga penerimaan saldo dalam kas.

## **2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Esensi dari organisasi yang dikendalikan dengan efektif terletak pada setiap manajemen, jika manajemen puncak merasa bahwa pengendalian intern itu penting, maka anggota dalam organisasi akan merasakan hal itu dan bereaksi dengan sungguh-sungguh untuk mematuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dipihak lain, jika pengendalian intern tidak dijadikan kepentingan utama manajemen puncak dan hanya sekedar *lip service* maka dapat dipastikan bahwa tujuan pengendalian intern tidak dapat tercapai dengan efektif.

Menurut tujuanya pengendalian intern dirancang untuk memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efesiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku. Sedangkan tujuan sistem pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang:

1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah Negara,
2. Keandalan laporan keuangan,
3. Pengamanan asset Negara,
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berikut penjelasan keempat tujuan sistem Pengendalian Intern pemerintah tersebut:

1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian Tujuan Penyelenggaraan Pemerintah Negara.

Kegiatan instansi dalam suatu pemerintahan dapat dikatakan efektif apabila telah ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan, efisien biasanya dikaitkan pemerintah dikatakan efisien bila mampu menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi (pelayanan terima), dengan bahan baku (sumber daya) yang sesuai dengan standar.

2. Keandalan Pelaporan Keuangan

Tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi sangat penting untuk pengambilan keputusan. Agar keputusan yang di ambil tepat dan sesuai dengan kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus handal/layak dipercaya, dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Karena jika laporan yang tersaji tidak memadai dan tidak benar, maka akan menyesatkan dan dapat mengakibatkan keputusan yang salah serta merugikan organisasi.

3. Pengamanan Aset Negara

Aset diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat, terutama dari penerimaan pajak dan bukan pajak, yang harus dimanfaatkan untuk

kepentingan negara/daerah. Pengamanan aset merupakan isu penting yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat mudahnya terjadi pencurian, penggelapan dan bentuk manipulasi lainnya.

#### 4. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Setiap kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan transaksi atau kegiatan harus taat terhadap kebijakan, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aspek hukum dapat mengakibatkan tindakan pidana maupun perdata berupa kerugian.

### 2.3 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. **Lingkungan pengendalian**
2. **Penilaian resiko**
3. **Kegiatan pengendalian**
4. **Informasi dan komunikasi dan**
5. **Pemantauan pengendalian intern<sup>7</sup>**

#### 2.2.1 Lingkungan Pengendalian

Tanpa lingkungan pengendalian yang efektif, keempat komponen lainnya mungkin tidak menghasilkan pengendalian internal yang efektif. Lingkungan pengendalian berfungsi sebagai payung bagi keempat komponen pengendalian internal lainnya. Lingkungan pengendalian terdiri atas tindakan, kebijakan, dan

---

<sup>7</sup>Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 2008 Tentang **SPIP ( Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)**,2008,Pasal 3,Hal.4

prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya bagi entitas tersebut.

Inti dari keberhasilan dalam pengendalian entitas secara efektif terletak pada sikap manajemen. Jika manajemen puncak sangat fokus terhadap pengendalian, maka anggota entitas lainnya juga akan bersikap demikian. Untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian, auditor perlu mempertimbangkan subkomponen dari lingkungan pengendalian itu sendiri, yaitu:

a) Integritas dan nilai-nilai etis

Subkomponen ini meliputi tindakan manajemen untuk mencegah karyawan melakukan tindakan yang tidak jujur, ilegal, atau tidak etis.

b) Komitmen pada kompetensi

Meliputi pertimbangan manajemen tentang persyaratan kompetensi yang harus dipenuhi bagi pekerjaan tertentu. Setiap karyawan diharapkan dapat menjalankan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya.

c) Partisipasi dewan komisaris dan komite audit

Dewan komisaris mewakili pemegang saham dalam mengawasi jalannya kegiatan entitas yang dilakukan atau dikelola manajemen. Dewan komisaris berperan penting dalam memastikan bahwa manajemen (selaku pihak yang diberikan kepercayaan oleh pemilik modal untuk mengelola dana perusahaan) telah mengimplementasikan pengendalian internal dan proses pelaporan keuangan secara layak.

Untuk membantu melakukan pengawasan terhadap manajemen, dewan membentuk komite audit yang diberikan tanggung jawab dalam mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen. Komite audit juga bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi secara berkelanjutan dengan auditor internal maupun auditor eksternal, termasuk menyetujui jasa audit dan nonaudit yang dilakukan oleh para auditor eksternal.

d) Filosofi dan gaya operasi manajemen

Manajemen melalui prinsip dan sikapnya, memberikan isyarat tertentu bagi para karyawannya mengenai arti penting pengendalian internal. Sebagai contoh, apakah manajemen sering melakukan tindakan yang mengandung risiko yang cukup besar bagi entitas, atau justru cenderung menghindari risiko? Apakah manajemen menetapkan target penjualan dan tingkat laba yang terlalu besar (tidak realistis), dan apakah karyawan didorong untuk melakukan tindakan yang agresif guna memenuhi harapan target tersebut? Dengan memahami gaya pengelolaan manajemen, auditor dapat merasakan sikap manajemen tentang pengendalian internal.

e) Struktur organisasi

Struktur organisasi menunjukkan tingkatan tanggung jawab dan kewenangan yang ada dalam setiap divisi atau bagian. Dengan memahami struktur organisasi klien, auditor dapat mempelajari

perihal pengelolaan entitas dan unsur-unsur fungsional bisnis serta melihat bagaimana pengendalian atas pengelolaan tersebut diterapkan.

f) perihal sumber daya manusia (karyawan entitas)

Karyawan yang tidak kompeten atau tidak jujur dapat merusak sistem, meskipun ada banyak pengendalian yang diterapkan. Karyawan yang jujur dan kompeten mampu mencapai kinerja yang tinggi meskipun hanya ada sedikit pengendalian. Akan tetapi, karyawan yang jujur dan kompeten bisa juga dapat terganggu kinerjanya sebagai akibat dari perasaan bosan, tidak puas, ataupun masalah pribadi lainnya. Karena pentingnya sumber daya manusia bagi keberhasilan sebuah entitas (pengendalian), metode atau kebijakan untuk mengangkat, mengevaluasi, melatih, mempromosikan, dan memberi kompensasi kepada karyawan merupakan bagian yang penting dari pengendalian internal.

### **2.2.2 Penilaian resiko**

Merupakan tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko terkait penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sebagai contoh, jika perusahaan sering mengalami kesulitan dalam menagih piutang usaha, maka perusahaan harus menyelenggarakan pengendalian yang memadai untuk mengatasi risiko lebih saji piutang usaha.

Penilaian risiko oleh manajemen berbeda dengan penilaian risiko oleh auditor, walaupun ada keterkaitannya. Apabila manajemen menilai risiko sebagai bagian

dari perancangan dan pelaksanaan pengendalian internal untuk memperkecil kekeliruan serta kecurangan, sedangkan auditor menilai risiko untuk memutuskan jenis dan cakupan bukti yang dibutuhkan dalam pemeriksaan. Jika manajemen secara efektif menilai dan menanggapi risiko tersebut, biasanya auditor akan mengumpulkan lebih sedikit bukti audit daripada jika manajemen gagal dalam mengidentifikasi atau menindaklanjuti risiko yang signifikan.

Auditor dapat mengetahui proses penilaian risiko yang dilakukan manajemen melalui penggunaan kuesioner atau diskusi dengan manajemen terkait untuk menentukan bagaimana manajemen klien mengidentifikasi risiko-risiko yang terkait dengan pelaporan keuangan, mengevaluasi signifikansi dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut, serta untuk memutuskan tindakan apa yang harus diambil untuk mengatasi risiko yang muncul.

### **2.2.3 Kegiatan Pengendalian**

Merupakan kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko telah diambil guna mencapai tujuan entitas. Kebijakan dan prosedur ini terdiri atas:

a) **Pemisahan tugas**

Pemisahan tugas disini maksudnya adalah pemisahan fungsi atau pembagian kerja. Ada dua bentuk yang paling umum dari penerapan prinsip pemisahan tugas ini, yaitu: (1) pekerjaan yang berbeda seharusnya dikerjakan oleh karyawan yang berbeda pula; (2) harus adanya pemisahan tugas antara karyawan yang menangani pekerjaan pencatatan aktiva dan

karyawan yang menangani langsung secara fisik (operasional). Sesungguhnya, rasionalisasi dari pemisahan tugas adalah bahwa tugas atau pekerjaan dari seorang karyawan seharusnya dapat memberikan dasar yang memadai untuk mengevaluasi pekerjaan karyawan lainnya. Jadi, hasil pekerjaan seorang karyawan seharusnya dapat diperiksa silang (cross check) kebenarannya oleh karyawan lainnya. Ketika seorang karyawan bertanggungjawab atas seluruh pekerjaan, biasanya potensi munculnya kesalahan maupun kecurangan akan meningkat. Oleh sebab itu sangatlah penting kalau pekerjaan yang berbeda seharusnya dikerjakan oleh karyawan yang berbeda pula.

b) Otorisasi yang tepat atas transaksi

Agar pengendalian berjalan dengan baik, setiap transaksi harus diotorisasi dengan tepat. Sebagai contoh, transaksi pembayaran kas dilakukan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berwenang. Ini dilakukan untuk menjamin bahwa kas hanya dibayarkan atas transaksi yang telah diotorisasi sebagai mana mestinya. Sesungguhnya, karakteristik yang paling utama (paling penting) dari pengendalian internal adalah penetapan tanggung jawab kemasing-masing karyawan secara spesifik. Penetapan tanggung jawab disini agar supaya masing-masing karyawan dapat bekerja sesuai dengan tugas-tugas tertentu (secara spesifik) yang telah dipercayakan kepadanya. Pengendalian atas pekerjaan tertentu akan menjadi lebih efektif jika hanya ada satu orang saja yang bertanggung jawab atas sebuah tugas/pekerjaan tertentu tersebut.

c) Dokumen dan catatan yang memadai

Dokumen dan catatan merupakan objek fisik dimana transaksi akan dicantumkan serta diiktisarkan. Contohnya adalah faktur penjualan, surat pesanan pembelian, jurnal penjualan dan pembelian, kartu hadir karyawan, kartu persediaan, dan laporan penerimaan barang. Dokumen yang memadai sangat penting untuk mencatat transaksi dan mengendalikan aktiva. Dokumen memberikan bukti bahwa transaksi bisnis atau peristiwa ekonomi telah terjadi. Dengan membubuhkan atau memberikan tanda tangan (atau inisial) kedalam dokumen, orang yang bertanggung jawab atas terjadinya sebuah transaksi atau peristiwa dapat diidentifikasi dengan mudah. Dokumentasi atas transaksi seharusnya dibuat ketika transaksi terjadi. Dokumen juga seharusnya bernomor urut cetak dan seluruh dokumen tersebut seharusnya dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang bernomor urut sangat membantu untuk mencegah terjadinya pencatatan transaksi secara berganda serta juga membantu untuk mencegah transaksi yang tidak dicatat. Adapun dokumen yang bernomor urut tercetak dilakukan untuk menghindari terjadinya dokumen atas transaksi fiktif. Dokumen ini sebagai sumber bukti (pendukung) transaksi seharusnya dapat dengan segera diteruskan kebagian/departemen akuntansi untuk menjamin pencatatan transaksi secara tepat waktu, akurat, dan memenuhi kriteria keandalan catatan akuntansi. Dokumen juga sesungguhnya sangat berfungsi sebagai penghantar informasi keseluruhan bagian organisasi. Dokumen haruslah dapat memberikan keyakinan yang

memadai bahwa seluruh aktiva telah dikendalikan dengan pantas dan bahwa seluruh transaksi telah dicatat dengan benar.

d) Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan

Untuk menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, aktiva dan catatan harus dilindungi. Jika tidak diamankan sebagaimana mestinya, aktiva dapat dicuri, diselewengkan, atau disalahgunakan. Demikian juga dengan catatan, jika tidak dilindungi secara memadai, catatan bisa dicuri, rusak, atau hilang yang sangat dapat mengganggu proses pencatatan akuntansi dan operasi normal bisnis perusahaan. Penggunaan pengendalian fisik, mekanik, dan elektronik sangatlah penting. Pengendalian fisik terutama terkait dengan pengamanan aktiva. Pengendalian mekanik dan elektronik juga mengamankan aktiva. Berikut ini adalah beberapa macam contoh dari penggunaan pengendalian fisik, mekanik, dan elektronik: (1) uang kas dan surat-surat berharga sebaiknya disimpan dalam safe deposits box; (2) catatan-catatan akuntansi yang penting juga harus disimpan dalam filing cabinet yang terkunci; (3) tidak semua atau sembarangan karyawan dapat keluar masuk gudang tempat penyimpanan persediaan barang dagang; (4) penggunaan kamera dan televisi monitor; (5) adanya sistem pemadam kebakaran atau alarm yang memadai; dan (6) penggunaan password system.

e) Pemeriksaan independen atau verifikasi internal.

Kebanyakan sistem pengendalian internal memberikan pengecekan independen atau verifikasi internal. Prinsip ini meliputi peninjauan ulang,

perbandingan, dan pencocokan data yang telah disiapkan oleh karwan lainnya yang berbeda. Untuk memperoleh manfaat yang maksimum dari pengecekan independen atau verifikasi internal, maka: (1) verifikasi seharusnya dilakukan secara periodik/berkala atau bisa juga dilakukan atas dasar dadakan; (2) verifikasi sebaiknya dilakukan oleh orang yang independen; (3) ketidakcocokan/ketidaksesuaian kekecualian seharusnya dilaporkan ketingkatan manajemen yang memang dapat mengambil tindakan yang korektif secara tepat.

Kebutuhan akan pengecekan independen meningkat, karena struktur pengendalian internal cenderung berubah setiap saat kalau tidak terdapat mekanisme penelahan yang sering. Pegawai mungkin akan menjadi lupa atau dengan sengaja tidak mengikuti prosedur, atau menjadi ceroboh jika tidak ada orang yang meninjau ulang dan mengevaluasi hasil pekerjaannya. Salah saji baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin dapat saja terjadi tanpa melihat kualitas dari sistem pengendalian yang selama ini telah dijalankan. Cara yang paling mudah untuk melakukan verifikasi internal adalah dengan menerapkan pemisahan tugas seperti yang telah dibahas sebelumnya. Dalam instansi, pengecekan independen sering dilakukan oleh auditor internal. Auditor internal disini adalah pegawai yang bertugas secara terus-menerus untuk melakukan evaluasi mengenai keefisienan dan keefektifan sistem pengendalian internal.

#### **2.2.4 Informasi dan Komunikasi**

Tujuan dari sistem informasi dan komunikasi akuntansi adalah agar transaksi yang dicatat, diproses, dan dilaporkan telah memenuhi keenam tujuan audit umum atas transaksi, yaitu: (1) transaksi yang dicatat memang ada, (2) transaksi yang ada sudah dicatat, (3) transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar, (4) transaksi yang dicatat diposting dan diiktisarkan dengan benar, (5) transaksi diklasifikasi dengan benar, dan (6) transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Dengan kata lain, sistem akuntansi harus dirancang untuk memastikan perihal keterjadian, kelengkapan, keakuratan, posting, dan pengiktisaran, klasifikasi, dan penetapan waktu transaksi dicatat.

Berikut adalah contoh dari tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi pembelian: (1) pembelian yang dicatat adalah untuk perolehan barang dari pemasok nonfiktif, (2) seluruh transaksi pembelian barang yang terjadi telah dicatat, (3) pembelian yang dicatat adalah untuk seluruh jumlah barang yang telah diperoleh dari pemasok nonfiktif dan telah dicatat dengan benar, (4) jurnal untuk mencatat transaksi pembelian telah dipindah-bukukan secara akurat kemasing-masing catatan pemasok (buku besar pembantu) dan buku besar umum, serta diiktisarkan kedalam laporan keuangan secara tepat, (6) transaksi pembelian telah dicatat pada tanggal yang benar.

#### **2.2.5 Pemantauan Pengendalian intern**

Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian atas mutu pengendalian internal secara berkesinambungan (berkala) oleh manajemen untuk menerapkan bahwa pengendalian telah berjalan sebagaimana yang diharapkan,

dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada dalam perusahaan. Informasi yang dinilai berasal dari berbagai sumber, termasuk studi atas pengendalian internal yang ada, laporan auditor internal, umpan balik dari personel operasional, dan lainnya.

Audit internal merupakan suatu rangkaian proses dan teknis dimana karyawan suatu perusahaan mencari kepastian atas keakuratan informasi keuangan dan jalannya operasi sesuai dengan yang ditetapkan. Disamping meningkatkan keandalan informasi dan memastikan dipatuhinya kebijakan manajemen, lingkup pekerjaan audit internal juga meliputi: perlindungan terhadap harta perusahaan dan penilaian terhadap apakah penggunaan sumber daya telah dilakukan secara ekonomis dan efisien. Dengan demikian sangatlah jelas bahwa audit internal telah menjadi suatu alat yang dominan bagi pimpinan perusahaan untuk memantau dan mengawasi jalannya kegiatan operasional perusahaan. Apalagi para pemeriksa (pengawas) internal ini tentu saja lebih mengetahui mengenai segala kebijakan, prosedur, dan berbagai permasalahan perusahaan secara lebih rinci dibandingkan pemeriksaan eksternal (akuntan publik)

#### **2.4 Prinsip-Prinsip Pengendalian Intern**

Salah satu komponen pengendalian internal menurut COSO adalah aktivitas pengendalian (*control activities*). Aktivitas pengendalian menunjukkan usaha perusahaan untuk mengidentifikasi resiko yang sedang dihadapi, seperti kecurangan (*fraud*).

Ada 6 prinsip dari aktivitas pengendalian, antara lain:

### 1. ***Establishment of Responsibility*** (pembentukan tanggung jawab)

Sebuah prinsip penting dari pengendalian internal adalah dengan menetapkan tanggung jawab kepada karyawan tertentu. Pengendalian menjadi efektif ketika hanya seorang yang ditugaskan untuk tanggung jawab tertentu. Pembentukan tanggung jawab sering mengharuskan pembatasan akses kepada karyawan yang memiliki otorisasi.

### 2. ***Segregation of Duties*** (pemisahan tugas)

Pemisahan tugas sangat penting dalam sistem pengendalian internal. Contohnya, karyawan yang merancang sistem komputer tidak boleh ditugaskan untuk pekerjaan yang menggunakan sistem tersebut, karena mereka bisa saja merancang sistem yang menguntungkan mereka secara pribadi dan melakukan kecurangan.

### 3. ***Documentation Procedures*** (prosedur dokumentasi)

Perusahaan harus membangun prosedur untuk mendokumentasi setiap transaksi. Perusahaan seharusnya menomorkan setiap dokumen transaksi sehingga kejadian transaksi dicatat dua kali dapat terhindar.

### 4. ***Physical Controls*** (pengendalian secara fisik)

Pengendalian secara fisik berhubungan dengan penjagaan aset dan memastikan ketepatan dan reliabilitas catatan akuntansi. Beberapa pengendalian secara fisik seperti *safety deposit boxes* untuk penempatan kas, fasilitas komputer dengan *password*, pemantauan dengan TV, penggunaan alarm, *time clock* untuk mencatat waktu kerja.

#### 5. *Independent Internal Verification* (verifikasi internal yang independen)

Prinsip ini melibatkan pemeriksaan data yang diperiksa oleh karyawan. Pemeriksaan catatan secara berkala atau secara mendadak seharusnya dilakukan oleh perusahaan.

#### 6. *Human Resource Controls* (pengendalian sumber daya manusia)

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sehubungan dengan pengendalian sumber daya manusia antara lain adalah memantau karyawan yang memegang kas, merotasi pekerjaan karyawan dan memberikan karyawan kesempatan untuk berlibur, melakukan pemeriksaan latar belakang. Yang dimaksudkan dengan pemeriksaan latar belakang adalah mengecek apakah pelamar kerja merupakan lulusan dari sekolah yang terdaftar di *list* perusahaan.

### 2.5 Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas

Sistem akuntansi pengeluaran kas adalah suatu proses yang dilaksanakan untuk melaksanakan pengeluaran kas baik dengan uang tunai untuk kegiatan pemerintahan. Sistem akuntansi pokok yang digunakan untuk melaksanakan pengeluaran kas yaitu sistem informasi akuntansi pengeluaran kas dengan bukti transaksi. Sistem informasi akuntansi pengeluaran kas termasuk salah satu sistem informasi yang harus didesain disebuah lembaga pemerintahan, karena penggelapan kas merupakan sumber yang paling rawan terjadinya penggelapan atau penyelewengan kas perusahaan atau lembaga, baik yang dilakukan secara personal atau persekongkolan.

Untuk menciptakan pengendalian intern yang baik, pemerintah harus menciptakan tanggungjawab secara jelas dan tiap orang yang memiliki tanggungjawab untuk tugas yang diberikan kepadanya. Apabila perumusan tanggungjawab tidak jelas dan terjadi kesalahan, maka akan sulit untuk mencari siapa yang bertanggungjawab atas kesalahan tersebut. Untuk mengawasi pengeluaran kas, maka diperlukan pengendalian intern yang baik terhadap kas yang memerlukan komponen-komponen yang memadai untuk melindungi pengeluaran kas.

#### 1. Prosedur Pengeluaran Kas Yang Baik

Seperti halnya penerimaan kas, sistem pengeluaran kas juga memiliki prosedur yang dirancang sedemikian rupa sehingga terhindar dari pencurian, kehilangan kas ataupun pengeluaran-pengeluaran yang tidak tepat pengelokasiannya, sehingga hanya pengeluaran-pengeluaran yang telah disetujui dan betul-betul untuk kegiatan perusahaan saja yang dicatat dalam pembukuan perusahaan/lembaga negara.

Prosedur pengeluaran kas adalah prosedur pengeluaran cek untuk melunasi utang yang sudah disetujui dan mencatat pengeluaran kas,serta pengeluaran-pengeluaran lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Untuk dapat menghasilkan sistem pengawasan yang baik,prosedur pengeluaran uang harus memperhatikan hal sebagai berikut: (1) semua pengeluaran dilakukan dengan cek, pengeluaran-pengeluaran dalam jumlah kecil dilakukan melalui dana kas kecil; (2) semua pengeluaran kas harus memperoleh persetujuan dari yang berwenang terlebih dahulu; (3) terdapat pemisahan tugas antara yang berhak

menyetujui pengeluaran kas, yang menyimpan uang kas dan melakukan pengeluaran serta yang mencatat pengeluaran kas; (4) semua pengeluaran uang menggunakan cek, kecuali untuk pengeluaran-pengeluaran kecil dibayar dari kas kecil; (5) dibentuk kas kecil yang diawasi dengan ketat; (6) pelunasan cek hanya dilakukan apabila didukung bukti-bukti yang lengkap atau dengan kata lain digunakan sistem voucher; (7) dipisahkan antara orang yang mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran, yang menulis cek, yang menandatangani cek dan yang mencatat penerimaan kas; (8) diadakan pemeriksaan intern dalam waktu tidak tentu dan diharuskan membuat laporan kas harian.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran kas adalah suatu transaksi yang menimbulkan berkurangnya saldo-saldo kas tunai milik perusahaan baik yang digunakan untuk aktivitas pembelian persediaan perusahaan, pembayaran utang dagang, maupun beban-beban yang mendukung aktivitas operasional perusahaan yang menyebabkan berkurangnya kas milik perusahaan.

## **2.6 Efektifitas Sistem Pengendalian intern Pengeluaran Kas**

Pada umumnya suatu pengendalian intern terhadap kas akan memisahkan fungsi penyimpanan dan pencatatan kas untuk meminimalisasi penyalahgunaan kas. Dengan adanya pengendalian intern yang memadai, perusahaan dapat mengurangi peluang-peluang pencurian, kehilangan dan kesalahan yang tidak disengaja dalam akuntansi dan pengendalian kas. Namun, pengendalian intern yang baik tidak dapat menghilangkan semua tindakan penyalahgunaan dan kekeliruan, hanya mengurangi. Hal-hal yang menyebabkan terhambatnya pengendalian intern yang efektif adalah kurangnya penerapan pengendalian intern

yang memadai. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.

Efektifitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk menjaga aliran kas dapat berjalan dengan baik maka perlu pengendalian intern yang efektif. Pengendalian intern yang efektif berjalan apabila unsur-unsur pengendalian intern berjalan dengan baik.

Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dijelaskan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan. Dari defenisi – defenisi di atas, keefektifan pengendalian intern dapat diartikan sebagai sebuah keberhasilan dari usaha atau tindakan entitas dalam mencapai tujuannya, yaitu untuk menjaga pelaporan keuangan entitas, menjaga efektivitas dan efisiensi operasi yang dijalankan entitas serta menjaga ketaatan terhadap hukum peraturan.

Tujuan umum dalam merancang Sistem Pengendalian yang efektif adalah

1. Reabilitas pelaporan keuangan

Manajemen memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan laporan bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya. Oleh karena itu, manajemen harus

memastikan bahwa informasi yang terkandung dalam laporan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

## 2. Efisiensi dan efektivitas operasi

Pengendalian memiliki peran mendorong pemakaian sumber daya secara efektif dan efisien agar mengoptimalkan tujuan perusahaan. Tujuan penting dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi, baik keuangan maupun nonkeuangan yang akurat berkaitan dengan operasi perusahaan untuk pengambilan keputusan.

## 3. Kepatuhan pada hukum dan peraturan

Organisasi-organisasi publik, nonpublik, dan nirlaba wajib menaati berbagai hukum dan peraturan. Hukum dan peraturan yang harus dipatuhi berkaitan langsung dengan akuntansi, seperti UU perlindungan lingkungan dan hal sipil, sedangkan yang berkaitan dengan akuntansi adalah peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

Adapun ukuran efektifitas instansi dalam sistem pengendalian intern adalah:

1. **Terciptanya Lingkungan pengendalian yang sehat.**
2. **Terselenggaranya penilaian resiko.**
3. **Terselenggaranya aktivitas pengendalian.**
4. **Terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi.**
5. **Terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.**<sup>8</sup>

Berikut ini akan dijelaskan lebih luas masing-masing elemen dari ukuran efektivitas instansi dalam pengendalian intern, yaitu:

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006: **Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Daerah**: Bagian kedua: Pengendalian intern Pasal 313 ayat (3)

### **1. Terciptanya Lingkungan Pengendalian Yang Sehat.**

Lingkungan pengendalian merupakan pengaruh gabungan dari berbagai faktor dalam membentuk, memperkuat atau memperlemah efektifitas kebijakan dan prosedur tertentu. Lingkungan pengendalian yang sehat mencerminkan keseluruhan sikap. Kesadaran dan tindakan dari dewan komisaris, manajemen, pemilik, dan pihak lain mengenai pentingnya pengendalian intern dan tekanannya pada satuan usaha yang bersangkutan.

### **2. Terselenggaranya Penilaian Resiko.**

Penilaian resiko laporan keuangan adalah mengidentifikasi dan menganalisa resiko-resiko yang berhubungan dengan manajemen perusahaan untuk menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penetapan resiko oleh manajemen berkenaan dengan hubungan resiko oleh manajemen berkenaan dengan hubungan resiko terhadap pernyataan laporan keuangan yang khusus dan kegiatan mencatat, memproses, menyimpulkan, dan melaporkan data akuntansi.

### **3. Terselenggaranya Aktivitas Pengendalian**

Pengendalian aktivitas adalah kebijakan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa arn manajemen dilaksanakan. Pengendalian ini meyakinkan tindakan-tindakan yang diambil untuk mengatasi resiko dalam mencapai tujuan organisasi. Pengawasan ini harus terlaksana pada semua tingkat fungsi manajemen.

#### **4. Terselenggaranya Sistem Informasi dan Komunikasi**

Informasi dan Komunikasi sangat berguna untuk menghasilkan laporan keuangan. Sistem informasi sangat relevan untuk tujuan laporan keuangan yang mencakup sistem akuntansi dan melindungi harta dan hutang perusahaan. Sistem akuntansi seharusnya mencakup penafsiran audit yang lengkap, karena penafsiran transaksi sangat penting bagi manajemen dan auditor. Dengan kata lain komunikasi melibatkan pemahaman yang jelas dari peran dan tanggungjawab setiap individu yang berkenaan dengan struktur pengendalian intern atas laporan keuangan. Komunikasi harus dapat meyakinkan bahwa setiap personil terlibat dalam memahami laporan keuangan dan kegiatan mereka baik diluar perusahaan ataupun dalam perusahaan.

#### **5. Terselenggaranya Kegiatan Pemantauan Pengendalian**

Pemahaman merupakan proses untuk menilai kualitas dari pelaksanaan struktur pengendalian intern yang telah berjalan. Struktur pengendalian intern yang berjalan diharapkan dapat mengatasi atau mengantisipasi penyimpangan atau kecurangan yang terjadi. Pemantauan dapat dilaksanakan selama kegiatan perusahaan dapat berjalan dan dapat dievaluasi secara periodik.

Dengan demikian, suatu pengendalian intern bisa dikatakan efektif apabila ukuran efektifitas pengendalian intern yang terdiri dari terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya pengendalian resiko, terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak audit internal guna untuk mencari kepastian atas keakuratan informasi keuangan dan jalannya operasi sesuai dengan ditetapkan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti dan menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek peneliti, juga dimana dan kapan peneliti dilakukan. Objek peneliti juga merupakan suatu sarana ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu yang mempunyai nilai skor atau ukuran yang berbeda dalam penulisan skripsi ini. Subjek penelitian ini adalah Hotraja Sitanggang ST, MM. Objek penelitian yang penulis pilih ialah pengendalian intern kas. Objek ini diteliti di Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir, Jl Simbolon Purba Km. 5,5, Rianiate Pangururan, Kabupaten Samosir.

#### **3.2 Jenis Data Penelitian**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama dan secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan tanya jawab kepada bagian yang bersangkutan mengenai komponen pengendalian intern kas pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir.

## 2. Data Sekunder

Jadongan Sijabat menegemukakan pengertian data sekunder : **“Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) atau merupakan bukti, catatan, atau laporan historis yang tersusun dalam arsip (data dokumentasi) yang dipublikasi dan tidak dipublikasi.”**<sup>9</sup>

Data sekunder adalah berupa data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk dokumen, seperti:

1. Sejarah singkat organisasi
2. Struktur Organisasi
3. SOP Pengeluaran Kas

### 3.3 Populasi Dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Pengertian populasi menurut Abuzar Asra dan Achmad Prasetyo adalah **“Kumpulan seluruh unit-unit pengamatan yang menjadi objek penelitian dalam suatu penelitian survey”**.<sup>10</sup>Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah pemerintahan Kabupaten Samosir yang berjumlah 70 Orang.

#### b. Sampel

---

<sup>9</sup>Jadongan Sijabat, **Metode Penelitian Akuntansi**, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2014, hal. 82

<sup>10</sup>Abuzar Asra dan Achmad Prasetyo, **Pengambilan Sampel**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta 2015, hal15

Sampel merupakan sebagian dari individu yang menjadi objek penelitian. Pengertian sampel menurut Abuzar Asra, Puguh Bodra Irawan dan Agus Purwoto adalah **“Sebagian dari unsure atau elemen atau unit pengamatan dari populasi yang sedang dipelajari tersebut”**.<sup>11</sup> Pengambilan sampel dapat digunakan dengan cara mengambil sebagian dari populasi sebagai objek penelitian. Menurut Puguh Suharso Desain *Sampling* adalah **“Kelompok data penelitian yang dikategorikan untuk mencatat sebagian dari seluruh elemen penelitian sebagai subjek penelitian”**.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan sebagai pertimbangan sampel adalah seluruh jumlah pegawai pada bagian pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir sebanyak 44 orang, yaitu:

**Tabel 3.1**

**Jumlah pegawai pada bagian Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir**

No.	Bagian	Jumlah Orang
1	Kepala Badan Pendapatan	1
2	Fungsional Umum	1
3	Sekretaris	1
4	Kabid Pengelolaan Pasar	1
5	Kabid Penagihan	1
6	Kabid Pendataan dan Penetapan	1
7	Kasubbid Pendataan dan Pelayanan	1
8	Kasubbid Keberatan dan Restibusi	1
9	Kasubbid Penetapan dan Penilaian	1

---

<sup>11</sup>Abuzar Asra, Puguh Bodro Irawan dan Agus Purwoto, **Motode Penelitian Survei**, Penerbit IN MEDIA, Bogor, 2014. Hal 70

<sup>12</sup>Puguh Suharso **Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis (Pendekatan Filosofi dan Praktis)**, PT Indeks, Jakarta barat, Hal 57

10	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1
11	Kasubbag PEP	1
12	Kasubbid Pemeriksaan Pajak dan Retribusi	1
13	Kasubbid Pelaporan	1
14	Kasubbid Kebersihan dan Ketertipan Pasar	1
15	Kasubbid Penerimaan Retribusi Pasar	1
16	Kasubbid Penagihan	1
17	Kasubbid Pemeliharaan Pasar	1
18	Fungsional Umum Bidang Penagihan	1
19	Fungsional Umum Bidang Penagihan	1
20	Fungsional Umum Bidang Pasar	1
21	Fungsional Umum Bidang Penetapan	1
22	Bendahara Pengeluaran	1
23	Fungsional Umum Bidang Penagihan	1
24	Fungsional Umum Bidang Pendapatan	1
25	Fungsional Umum Bidang Pendapatan dan Penetapan	1
26	Fungsional Umum Tata Usaha	1
27	Fungsional Umum Bidang Penagihan	1
28	Fungsional Umum Bidang Penagihan	1
29	Fungsional Umum Bidang Penagihan	1
30	Bendahara Penerimaan	1
31	Fungsional Umum Bidang Penagihan	1
32	Fungsional Umum Bidang Pendapatan dan Penetapan	1
33	Fungsional Umum Bidang Penagihan	1
34	Staf Bidang Pasar	1
35	Staf Bidang Pendataan dan Penetapan	1
36	Staf Bidang Penagihan	1
37	Staf Tata Usaha	1
38	Staf Bidang Pendataan dan Penetapan	1

39	Staf Bidang Pendataan dan Penetapan	1
40	Staf Tata Usaha	1
41	Staf Tata Usaha	1
42	Staf Bidang penagihan	1
43	Staf Bendahara Penerimaan	1
44	Staf Bidang Pendataan dan Penetapan	1

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik kuisisioner, teknik observasi, dan studi dokumentasi.

#### a. Kuisisioner

Penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah kuisisioner. Adapun alasan penyusunan menggunakan kuisisioner, karena kuisisioner merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang efektif untuk keadaan responden dalam instansi. Efektif mengandung pengertian sebagai pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan yang tepat dan sukses dalam mengimplementasikannya, melakukan hal yang tepat, dengan tepat, diwaktu yang tepat.

#### b. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap sistem pengendalian intern pengeluaran kas yang ada dalam instansi. Tujuan Pengamatan terutama adalah mencatat atau mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya, atau bisa juga ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian.

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan yaitu dengan mengamati prosedur kerja Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten

Samosir untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian intern pengeluaran yang ada dalam instansi.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengambilan data dari laporan-laporan yang sudah diolah sebelumnya sehingga tidak langsung diperoleh dari sumbernya. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan dan dokumentasi yang dimiliki oleh instansi terutama pada bagian-bagian yang terkait dalam pengeluaran kas pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir.

## 3.5 Metode Analisi Data

### 1. Metode Deskriptif

Menurut **Moh. Nazir** penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan karakteristik dari suatu populasi tentang suatu fenomena yang diamati atau salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran yang lengkap mengenai setting sosial.<sup>13</sup>

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu Sistem Pengendalian Intern Pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir

Analisis data yang akan dilakukan setelah semua kuisioner dikumpulkan yaitu, dengan cara:

#### a. Persiapan

---

<sup>13</sup> Moh. Nazir, **Metode Penelitian**. Catatan keenam: Ghalia Indonesia, bogor, 2005, hal.111

Langkah pertama yang dilakukan adalah pengecekan identitas responden, pengecekan kelengkapan pengisian dan pengecekan lainnya yang bertujuan supaya data yang dikumpulkan maksimal

b. Tabulasi

Kegiatan dalam mengelompokkan data kedalam table frekuensi untuk mempermudah dalam menganalisa kegiatan tabulasi *coding* dan *Scoring*. *Coding* adalah memberikan kode pada setiap data yang telah diedit. *Scoring* adalah memberikan skor pada jawaban responden untuk memperoleh data kuantitatif dalam penelitian. Penelitian menggunakan skala likert modifikasi dengan jawaban yang diberikan oleh pengendalian intern pengeluaran kas dengan melihat unsur-unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, pemahaman resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan adalah Ya (Y) = 1, Tidak (T) = 0, Penerapan data disesuaikan dengan penelitian.

Rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

**Keterangan :**

**P = Persentase**

**F = Frekuensi**

**N = Total Jumlah**

**Tabel 3.2**

### Skala Pengukuran Efektivitas

<b>Presentase (%)</b>	<b>Kriteria</b>
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

**Sumber: Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327<sup>14</sup>**

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100 % itu berarti sangat efektif dan apabila persentase kurang dari 100 % itu berarti tidak efektif.

---

<sup>14</sup>Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327